

**PROSEDUR PENUNJUKKAN KELOMPOK KERJA BURUH
PADA KOPERASI TKBM. KOMURA DI PERUSAHAAN
BONGKAR MUAT PT BUDI INTI REJEKI**

Mika Patayang¹⁾ Maulita²⁾ Muhammad Alfian Noor³⁾

^{1) 2) 3)} Jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda

E-mail : prapdopo@polnes.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penunjukkan kelompok kerja buruh pada Koperasi TKBM. Komura di Perusahaan Bongkar Muat PT Budi Inti Rejeki. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data serta informasi-informasi dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan prosedur penunjukkan buruh TKBM. Komura berjalan dengan baik hingga saat ini. Namun, ada beberapa kendala yang terjadi pada saat melakukan prosedur penunjukkan buruh TKBM. Komura, masing-masing kepala kelompok kerja hanya mementingkan kepentingan pribadi dan masih sering terjadinya *kolusi* antara bagian operasional kantor PBM dan bagian operasional Koperasi. Saran penulis perlu di adakan sosialisasi ulang terhadap semua anggota TKBM mengenai jatah muatan bongkar untuk masing-masing kelompok kerja dan perlu adanya tindak tegas dari pihak terkait mengenai *kolusi* yang sering dilakukan oleh mandor untuk bagian operasional perusahaan.

Kata Kunci : prosedur, penunjukkan, buruh TKBM. Komura

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelabuhan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan arus barang, yang sangat aktif dalam kegiatan perdagangan. Pelabuhan Samarinda juga merupakan pelabuhan nasional yang melayani kegiatan dan alih muat barang dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas.

Pelabuhan Samarinda juga merupakan pelabuhan yang dijadikan tempat oleh kapal dagang dalam pelayaran yang singgah untuk memuat atau membongkar muatannya. Maka dari itu Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) merupakan faktor yang paling penting dalam menjamin proses bongkar muat dari dan ke kapal. Ketersediaan tenaga kerja bongkar muat dengan keterampilan yang memadai dan dengan jumlah yang tepat selalu menjadi tujuan dari pelaksanaan bongkar muat meskipun tidak merupakan faktor pendukung lainnya berpengaruh dalam proses bongkar muat

seperti mesin *crane* (mesin pengangkut), *forklift*, dan lain sebagainya.

Sadar akan pentingnya pengaturan terhadap transportasi laut, maka dibentuklah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal.

Dalam ketentuannya Pasal 3 Ayat (3) Permenhub No 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal yang menyatakan “Tenaga Kerja Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat”.

Kegiatan bongkar muat barang dapat dihubungkan dengan upah bongkar muat yang merupakan salah satu faktor produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Tenaga kerja pelabuhan sangat berperan aktif dalam proses bongkar muat di pelabuhan, karena mereka yang terjun langsung di lapangan, sehingga sangat membantu dalam kelancaran

proses bongkar muat. Maka dengan demikian upah bongkar muat menjadi suatu hal yang diperhatikan dalam aktivitas bongkar muat sehingga tenaga kerja bongkar muat mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Banyaknya Tenaga Kerja Bongkar Muat yang tergabung pada Koperasi TKBM. Komura Samarinda, dibentuklah kelompok kerja, kelompok kerja ini biasa disebut sebagai "Unit". Dan pihak dari Perusahaan Bongkar Muat untuk melancarkan aktivitas *stevedoring* di laut atau darat maka pihak Perusahaan

Bongkar Muat membuat surat penunjukkan ke kantor Koperasi TKBM. Komura. Oleh karena itu penulis terdorong untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk tugas akhir dengan judul "**Prosedur Penunjukkan Kelompok Kerja Buruh Pada Koperasi TKBM. Komura Di Perusahaan Bongkar Muat PT Budi Inti Rejeki**".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penunjukkan kelompok kerja buruh di Perusahaan Bongkar Muat PT. Budi Inti Rejeki?
2. Apakah hubungan antar kepala kelompok kerja (Mandor) dengan kepala kelompok kerja yang lain sudah terjalin harmonis?
3. Apa kendala yang terjadi pada saat melakukan pengurusan surat penunjukkan buruh di koperasi TKBM. Komura ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Prosedur

Menurut Hamdani (2007) dalam bukunya yang berjudul "Seluk-beluk perdagangan ekspor impor". Prosedur adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara berurutan mulai dari langkah awal hingga langkah terakhir dalam rangka penyelesaian proses suatu pekerjaan.

Dari pengertian yang telah dikemukakan disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi yang telah berulang-ulang.

Pengertian Tenaga Kerja Bongkar Muat

Menurut Suyono (2007) Tenaga Kerja Bongkar Muat adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan. Tenaga Kerja Bongkar Muat juga sering disebut dengan Buruh Pelabuhan. Peran Buruh di pelabuhan sangatlah penting, karena mereka berhubungan langsung dengan lapangan. Dengan demikian kesejahteraan TKBM sangat penting untuk diperhatikan guna kelancaran kegiatan di pelabuhan. organisasi PBM yang lengkap akan terdiri dari bagian *stevedoring* dan bagian pergudangan yang dipimpin oleh dan dikoordinasi seorang kepala. Karena kepala ini menguasai terminal bongkar muat, dermaga, gudang serta lapangan penumpukkan maka disebut ia sebagai kepala terminal. Dalam menjalankan tugasnya, operator terminal akan dibantu oleh kepala *stevedoring* dan pergudangan, serta staf administrasi yang akan membukukan semua kegiatan yang ada dalam terminal.

Hubungan Antara Perusahaan Bongkar Muat dan Tenaga Kerja

Bongkar Muat

Kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia sejak zaman prasejarah hingga zaman *modern* saat ini dalam perjalanan manusia mengenal dan menguasai teknologi, laut semakin disadari merupakan media yang sangat penting dalam berbagai kegiatan manusia, sebagai sumber energi yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan dapat menyejahterakan umat manusia.

Melihat kenyataan bahwa kondisi geografis Indonesia merupakan Negara kepulauan, daerah perairan jauh lebih luas dibanding daratannya, maka sudah merupakan hal wajar apabila pembangunan dan pengaturan transportasi laut dewasa ini perlu mendapat perhatian besar. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal

dan memindahkan barang kargo maupun penumpang kedalamnya. Pada dasarnya kecenderungan sistem pengelolaan pelabuhan sejalan dengan tatanan, arah, sasaran, dan tuntutan pelayanan pelabuhan serta perkembangan pola distribusi dan transportasi barang dibutuhkan adanya aliansi strategis antara penyelenggara pelabuhan (PT Pelindo) dalam upaya meningkatkan produktivitas salah satunya Perusahaan Bongkar Muat (selanjutnya disingkat PBM) dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Pengertian Bongkar Muat

Menurut Sudjatmiko (1993), muatan dari dan ke atas kapal untuk ditimbulk ke dalam atau langsung diangkut ketempat pemilik barang dengan melalui dermaga pelabuhan dengan mempergunakan alat pelengkap bongkar muat, baik yang berada di dermaga maupun yang berada di kapal itu sendiri. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bongkar Muat adalah mengeluarkan dan memasukan muatan muatan dari atau ke kapal (kereta,dsb). Pendapat lain dari Dirk koleangan (2008), Bongkar muat adalah kegiatan memindahkan barangbarang dari alat angkut darat, dan untuk melaksanakan kegiatan pemindahan muatan tersebut dibutuhkan tersedianya fasilitas atau peralatan yang memadai dalam suatu cara atau prosedur pelayanan.

Definisi Konseptional

- a. Prosedur merupakan suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi yang telah berulang-ulang atau langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara berurutan mulai dari langkah awal hingga langkah terakhir dalam rangka penyelesaian proses suatu pekerjaan.
- b. TKBM adalah Tenaga Kerja Bongkar Muat yang secara resmi terdaftar sebagai

pekerja bongkar muat dipelabuhan atau sering disebut buruh pelabuhan.

- c. Bongkar Muat adalah proses mengeluarkan barang atau muatan dari palka ke atas dermaga dan sebaliknya memasukan barang atau muatan dari atas dermaga ke palka.
- d. Perusahaan Bongkar Muat adalah sebuah perusahaan yang berbadan hukum biasanya berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT). Peran PBM hanya menyediakan jasa alat untuk kegiatan bongkar muat dari gudang ke kapal dan/ atau dari kapal ke gudang.
- e. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

METODE PENELITIAN

Perincian Data yang diperlukan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, adapun yang dapat diperlukan untuk mempermudah dalam penyusunan laproan adalah sebagai berikut :

Prosedur Penunjukkan Ke-lompok Kerja Buruh Pada Koperasi TKBM. Komura Di Perusahaan Bongkar Muat PT Budi Inti Rejeki adalah data-data dokumen untuk pengurusan dan penunjukkan masing-masing kelompok kerja buruh (TKBM) untuk melakukan aktivitas bongkar muat di atas kapal.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam Tugas Akhir berdasarkan dari faktafakta dan dari apa yang dialami oleh penulis selama melaksanakan praktek kerja lapangan, kemudian dari data-data dan fakta-fakta yang ada tersebut menjadi bahan penyusunan ini.

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Riset Lapangan, penelitian yang dilakukan langsung ke objeknya yaitu Kantor Perusahaan Bongkar Muat PT Budi Inti Rejeki dan Koperasi TKBM. Komura Samarinda.
- b. Riset Kepustakaan, penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengambil literatur buku-buku, peraturan undang-undang dan media lainnya seperti internet dan artikel berhubungan dengan masalah yang akan dibahas untuk mendapatkan teori dan definisi yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini.

kelompok kerja buruh pada koperasi TKBM. Komura di Perusahaan Bongkar Muat PT Budi Inti Rejeki cabang Samarinda.

Kendala Dalam Melakukan Prosedur Penunjukkan Kelompok Kerja Buruh

Sering terjadinya masalah atau kendala dalam melakukan prosedur penunjukkan kelompok kerja buruh, yaitu:

- a. Saling menjatuhkan antar kepala kelompok kerja yang satu dengan yang lainnya guna kepentingan pribadi dan kelompok.

Seringnya mendapat mandor buruh yang ingin mendapat muatan besar sehingga masing-masing kepala kelompok kerja atau mandor memperebutkan muatan full atau 20.000 MT. Karena mereka yang dapat muatan 20.000 MT mendapatkan gaji full. Sedangkan yang mendapat muatan sisa hanya dapat sebagian gaji karena tidak sampai 20.000 MT. Muatan sisa adalah muatan yang hanya sisa dari total muatan. Misal 50.000 MT, di unit pertama dan kedua mereka masing masing mendapat muatan bongkaran batu-bara 20.000 MT dan unit ketiga di pastikan mendapat 10.000 MT. karena di koperasi TKBM. Komura, gaji buruh berdasarkan muatan yang di kerjakan. Maka dari itulah saling menjatuhkan antar mandor guna kepentingan sendiri atau kelompok sering terjadi di koperasi TKBM. Komura.

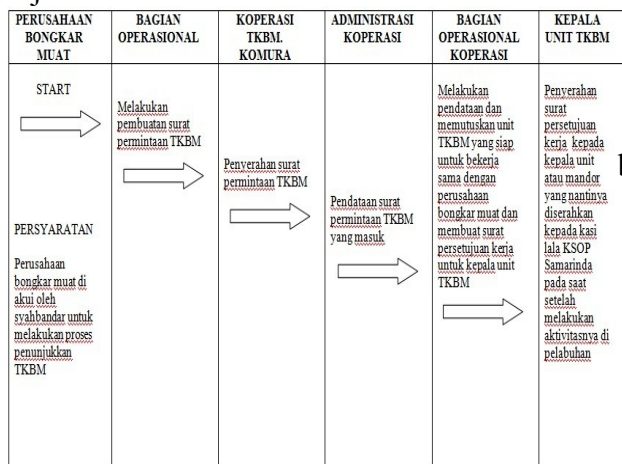
- b. Sering nya terjadi *kolusi* antar mandor dan operasional perusahaan. Seringnya terjadinya *kolusi* yang diberikan oleh mandor untuk operasional perusahaan bongkar muat sehingga membuat giliran unit yang siap ditunjuk oleh operasional koperasi menjadi kacau dan tidak beraturan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan judul yang dikemukakan penulis pada latar belakang yaitu tentang Prosedur Penunjukkan Kelompok Kerja Buruh Pada Koperasi TKBM. Komura di Perusahaan Bongkar Muat PT Budi Inti Rejeki. Maka dalam bab ini hasil dan pembahasan akan dibahas Bagaimana Prosedur Penunjukkan Kelompok Kerja Buruh Pada Koperasi TKBM. Komura di Perusahaan Bongkar Muat PT Budi Inti Rejeki seperti yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

Gambar 1 Prosedur Penunjukkan Kelompok Kerja Buruh



Sumber: Koperasi TKBM. Komura Samarinda

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis akan membahas bagaimana Prosedur penunjukkan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perusahaan Bongkar Muat PT Budi Inti Rejeki dan Koperasi TKBM. Komura, mengenai prosedur penunjukkan kelompok kerja buruh dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan prosedur penunjukkan kelompok kerja buruh yang telah dijelaskan di Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik. Karena sampai saat ini tidak ada kendala serius yang terjadi pada saat melakukan prosedur penunjukkan kelompok kerja buruh pada Koperasi TKBM. Komura di Perusahaan Bongkar Muat PT Budi Inti Rejeki.
2. Banyaknya jumlah TKBM yang tergabung pada koperasi TKBM. Komura maka dibentuklah kelompok kerja atau unit yang terdiri dari 34 unit . 1 unit kelompok kerja terdiri dari 25 orang yang dipimpin oleh masing masing mandor atau kepala kelompok kerja. Di antara masing-masing kepala kelompok kerja atau mandor sering terjadi perselisihan dikarenakan masingmasing mandor dari unit ke unit saling memperebutkan muatan bongkar yang bermuatan full atau 20.000 MT dari batas *maximum* yang telah ditetapkan dari Koperasi TKBM. Komura.
3. Kendala yang sering terjadi pada saat melakukan pengurusan surat penunjukkan buruh, antara lain:
 - a. Masing-masing mandor seringkali tidak terima jika mendapat muatan bongkar yang sedikit atau tidak sampai 20.000 MT.
 - b. Sering terjadinya *kolusi* yang diberikan oleh mandor untuk operasional perusahaan bongkar muat sehingga membuat giliran unit yang siap ditunjuk oleh operasional koperasi menjadi kacau dan tidak beraturan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perusahaan Bongkar Muat PT Budi Inti Rejeki dan Koperasi TKBM. Komura, mengenai prosedur penunjukkan kelompok kerja buruh dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu diadakan sosialisasi ulang terhadap semua anggota TKBM termasuk mandor

- TKBM mengenai jatah muatan bongkar pada masing-masing unit.
2. Perlu adanya tindak tegas dari pihak yang terkait mengenai *kolusi* yang sering dilakukan oleh mandor untuk bagian operasional perusahaan yang mengurus surat penunjukkan di Koperasi TKBM. Komura. Agar giliran unit atau kelompok kerja yang telah ditunjuk oleh bagian operasional koperasi lebih teratur dan adil.

DAFTAR RUJUKAN

- Hamdani (2007) *seluk-beluk perdagangan ekspor-impor oleh hamdani, jakarta*, penerbit "Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia" (BUSHINDO).
- Sudjatmiko, (1995). *Pokok-pokok Pelayaran Niaga* : Edisi Pertama. Jakarta: Satya Widya.
- Suyono,R.P (2005) *Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui laut*, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997, tentang ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perkoperasian
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 63 Ayat 1 Huruf B Tentang Perkoperasian
- Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan Ke kapal
- Di akses dari www.sptkbn.blogspot.co.id/2011/11/koperasi-tkbn-selayangpandang)
- Di akses dari <http://pelayaranjepara.blogspot.co.id/2015/03/perusahaan-bongkarmuat-pbm-jepara.html>)

